

## MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN VALUE OF MONEY

<sup>1</sup>Angelina Olivia Naibaho, <sup>2</sup>Filja Azkiah Siregar, <sup>3</sup>Diva Alnaya, <sup>4</sup>Putri Kemala Dewi  
Lubis, <sup>5</sup>Khairani Alawiyah Matondang

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara  
<sup>1</sup>[angelolivia0504@gmail.com](mailto:angelolivia0504@gmail.com), <sup>2</sup>[filja.7223540016@mhs.unimed.ac.id](mailto:filja.7223540016@mhs.unimed.ac.id),  
<sup>3</sup>[divaalnaya34@gmail.com](mailto:divaalnaya34@gmail.com), <sup>4</sup>[putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com](mailto:putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com),  
<sup>5</sup>[alawiyah@unimed.ac.id](mailto:alawiyah@unimed.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to measure the financial performance of the Banda Aceh City Government based on the Value for Money approach, which evaluates performance through economy, efficiency, and effectiveness ratios. The research uses a descriptive quantitative method with secondary data obtained from the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) in the form of the Local Government Budget Realization Report (LRA) for the years 2018–2024. Data include budget and realization of regional revenues and expenditures, which are analyzed using the economy ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio. The results show that the economy ratio of Banda Aceh City is consistently below 100 percent in all observed years, indicating that the government has implemented economic spending and avoided budget overspending. However, the efficiency ratio shows that Banda Aceh City has not been able to manage its finances efficiently, as most years fall into the inefficient or less efficient categories, with 2023 being the least efficient year when expenditure exceeded revenue. Meanwhile, the effectiveness ratio shows positive performance, where Banda Aceh successfully achieved and even exceeded its revenue targets, with 2023 recorded as a highly effective year. Overall, the Banda Aceh City Government demonstrates economic and effective financial performance, although efficiency remains a significant challenge. Strengthening revenue management and controlling operational spending are necessary to improve financial sustainability in the future.*

**Kata kunci** :Value for Money, Economy Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Financial Performance

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan pendekatan Value for Money, yang dievaluasi melalui rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018–2024. Data yang digunakan mencakup anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah, yang dianalisis menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis Banda Aceh selalu berada di bawah 100 persen pada seluruh tahun pengamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan belanja secara ekonomis dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Namun, rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum mampu mengelola keuangan secara efisien, karena sebagian besar tahun berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien, dengan tahun 2023 sebagai tahun paling tidak efisien ketika realisasi belanja melebihi pendapatan. Sementara itu, rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang baik, di mana Banda Aceh berhasil mencapai bahkan melampaui target pendapatan, dengan tahun 2023 sebagai tahun sangat efektif.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja keuangan yang ekonomis dan efektif, meskipun efisiensi masih menjadi tantangan utama. Penguatan pengelolaan pendapatan dan pengendalian belanja diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal daerah ke depan.

**Kata kunci** :Value for Money, Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai tujuan strategis, setiap organisasi baik sektor bisnis maupun public menempatkan kinerja sebagai prioritas utama yang harus dicapai. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai tolok ukur yang merefleksikan sejauh mana keberhasilan pengelolaan fiskal daerah dalam satu periode waktu. Pengukuran ini melibatkan analisis komprehensif atas realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta pembandingannya dengan target dan standar baku yang telah ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses evaluasi ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dan dijadikan pedoman dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya (P. K. D. Lubis et al., 2023). Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi instrumen vital yang harus disusun berdasarkan karakteristik operasional organisasi guna menilai efektivitas pencapaian sasaran tersebut (Luther, 2016).

Urgensi pengukuran kinerja ini semakin relevan dalam lanskap sektor publik seiring dengan penerapan otonomi daerah. Fenomena ini menuntut adanya akuntabilitas yang lebih tinggi, di mana instansi pemerintah tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga berkomitmen penuh memikul tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan misi pembangunan daerahnya (N. Fadhila & Tanjung, 2022). Dalam konteks ini, pengukuran kinerja bertransformasi menjadi alat pembuktian bahwa pemerintah daerah telah mengelola amanat rakyat secara transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada prinsip *value for money* ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagai entitas sektor publik yang bersifat nirlaba, pemerintah memegang mandat utama untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, realisasi fungsi pelayanan ini menempatkan pemerintah pada peran ganda yang krusial: di satu sisi harus melakukan belanja daerah untuk membiayai operasional dan program pembangunan, sementara di sisi lain dituntut untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui penghimpunan dana. Oleh karena itu, strategi optimalisasi Pendapatan Daerah menjadi langkah mutlak yang harus ditempuh agar pemerintah memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menopang seluruh aktivitas pelayanannya (S. Rahayu & Ginting, 2017).

Dalam lanskap otonomi daerah, aspek keuangan memegang peranan sentral sebagai fondasi utama kemandirian suatu wilayah. Kendati kapasitas fiskal ini tidak berdiri sendiri karena turut dipengaruhi oleh ekosistem pendukung seperti kualitas sumber daya manusia, tata kelola manajemen, serta ketersediaan sarana prasarana urgensinya tetap tidak tergantikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya keuangan dianggap sebagai variabel paling krusial, karena hal ini menjadi penentu utama bagi keberlangsungan roda pemerintahan dalam merealisasikan mandat otonomi itu sendiri (N. Fadhila & Tanjung, 2022).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, yang kini ditegakkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (sebagai pembaruan dari UU sebelumnya), bertujuan utama memberdayakan daerah. Kerangka regulasi ini memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta memenuhi kebutuhan rakyatnya. Lebih lanjut, kewenangan ini diperkuat oleh Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mengandung konsekuensi fiskal penting: daerah memiliki hak untuk memungut dan mengoptimalkan pendapatan secara mandiri, sekaligus menjalankan fungsi distributif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penentu prioritas pembangunan wilayah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya sekedar menjalankan wewenang administrasi, melainkan juga harus mampu menjadi manajer fiskal yang efektif dan mandiri (A. L. Sholikhah & Priyono, 2022).

Pemerintah Kota Medan, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan mandat desentralisasi. Hal ini berarti Pemerintah Kota Medan didorong untuk memiliki otonomi keuangan yang lebih besar dan diberi kewenangan penuh untuk mengelola serta memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak hanya diukur dari aspek administratif, melainkan sangat bergantung pada kemampuan manajemennya dalam mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Mutlak diperlukan evaluasi kinerja yang komprehensif, sebagai tolok ukur atas tingkat pencapaian hasil kerja, khususnya dalam menilai realisasi program pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah (T. Rahmadani et al., 2025).

Kebutuhan akan evaluasi kinerja terhadap penyelenggara negara semakin mendesak, didorong oleh meningkatnya kecerdasan dan sikap kritis masyarakat. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik yang ketat dari seluruh lembaga sektor publik. Tuntutan reformasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan *good governance* ini mencakup aspek pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga harus bersifat ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi instrumen esensial untuk membuktikan bahwa amanat rakyat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (N. Fadhila & Tanjung, 2022).

Untuk menindaklanjuti tuntutan *good governance* tersebut, pemerintah daerah wajib mempertunjukkan kondisi keuangannya melalui laporan keuangan daerah. Salah satu laporan utama yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menguji akuntabilitas tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui LRA, publik dapat menilai apakah pengelolaan anggaran daerah yang merupakan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. Inilah yang menjadikan LRA sebagai alat evaluasi krusial untuk mengetahui tingkat pencapaian target suatu pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, karena seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal yang dimilikinya. Dalam literatur keuangan publik, kinerja keuangan dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui kebijakan anggaran (Sucipto, 2003). Pemerintah daerah tidak berorientasi pada profit sebagaimana sektor bisnis, sehingga kinerja keuangan tidak diukur berdasarkan pencapaian laba, tetapi berdasarkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan, mengalokasikan anggaran, serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kepada publik.

Pengukuran kinerja keuangan menjadi semakin penting sejak diberlakukannya otonomi daerah, yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Otonomi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menempatkan tanggung jawab besar pada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan APBD agar dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kinerja keuangan berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan amanat desentralisasi secara akuntabel, transparan, dan efisien (A. Sholikhah & Priyono, 2022). Secara teoritis, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari teori keagenan (*agency theory*), di mana masyarakat bertindak sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik. Dalam kerangka ini, pemerintah harus menunjukkan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang dapat dipercaya serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ketika pemerintah daerah mampu menampilkan laporan keuangan yang baik dan menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, tingkat kepercayaan publik meningkat dan potensi konflik keagenan dapat diminimalisir (S. Rahmadani et al., 2025). Sebaliknya, jika terjadi ketidakefisienan, pemborosan, atau ketidaktransparanan, maka fungsi pemerintahan akan dipertanyakan oleh publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada praktiknya tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang dicapai. LRA menjadi indikator utama untuk menilai apakah pemerintah mampu mencapai target pendapatan, menekan biaya secara efisien, serta melaksanakan belanja sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. (R. Lubis et al., 2023) menjelaskan bahwa LRA merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban utama pemerintah daerah karena laporan tersebut menunjukkan kondisi riil keuangan daerah selama satu periode anggaran dan menjadi dasar evaluasi bagi perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Di samping itu, kinerja keuangan daerah juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga kinerja keuangan mereka lebih ditentukan oleh seberapa baik pemerintah mengelola belanja dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan (S. Rahayu & Ginting, 2017). Ketergantungan ini membuat analisis kinerja keuangan menjadi sangat penting untuk menilai apakah pemerintah daerah telah mampu menyusun strategi optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

Pengukuran kinerja keuangan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, pengendalian internal, dan responsivitas menjadi faktor penting yang menentukan kualitas kinerja keuangan. Pemerintah daerah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan lebih mudah memastikan bahwa anggaran yang dikelola tidak hanya tepat guna, tetapi juga tepat manfaat bagi masyarakat (N. Fadhila & Tanjung, 2022). Dengan demikian, analisis kinerja keuangan pada dasarnya menjadi instrumen yang menghubungkan aspek teknis pengelolaan anggaran dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Selain itu, dalam perspektif manajemen keuangan sektor publik, kinerja keuangan juga dipandang sebagai refleksi kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan stabilitas

fiskal dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja publik diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial, bukan sekadar untuk pembiayaan rutin. Dalam konteks ini, efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan konsep yang luas dan multidimensional. Ia tidak hanya berbicara tentang pencapaian angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi juga mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menata keuangan secara bijak demi mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah bekerja secara optimal dalam mengelola sumber daya publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan. Belanja daerah pada dasarnya menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Halim, 2021), belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu, sehingga belanja menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara teoritis, konsep belanja daerah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban umum, administrasi pemerintahan, dan pembangunan ekonomi lokal. (Mardiasmo, 2018) menegaskan bahwa belanja daerah mencerminkan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta karena memiliki sifat publik, tidak kompetitif, dan manfaatnya bersifat kolektif. Oleh karena itu, belanja daerah memiliki fungsi utama sebagai alat distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam perekonomian daerah.

Dalam regulasi Indonesia, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Belanja modal merupakan belanja yang menghasilkan aset tetap seperti jalan, jembatan, gedung, alat berat, dan fasilitas publik lainnya. Menurut (Suparmoko, 2020), belanja modal merupakan indikator penting kualitas pembangunan fisik daerah karena belanja ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Belanja tidak terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk kondisi darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan mendesak lainnya. Adapun belanja transfer mencakup belanja yang diberikan kepada desa atau pemerintah yang lebih rendah tingkatannya dalam rangka mendukung pembangunan. Klasifikasi ini membantu

pemerintah daerah dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi anggaran secara lebih terstruktur sehingga dapat menghindari tumpang tindih program atau alokasi yang tidak efisien.

Dalam perspektif ekonomi publik, belanja daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah melalui belanjanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur. Menurut (Stiglitz, 2016), pengeluaran publik harus diarahkan untuk memperbaiki kegagalan pasar dan menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Dalam konteks daerah, belanja publik sering diarahkan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan konektivitas, dan memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Efektivitas belanja daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan prioritas pembangunan jangka panjang. (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa belanja daerah yang efektif harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat program, tepat waktu, dan tepat manfaat. Kegagalan dalam perencanaan sering menyebabkan terjadinya silpa besar, ketidaksesuaian program, atau realisasi anggaran yang tidak optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD menjadi langkah penting dalam menjamin keharmonisan kebijakan pembangunan.

Selain perencanaan, mekanisme pelaksanaan belanja daerah juga memengaruhi kualitas kinerja keuangan. Pelaksanaan anggaran memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dalam pendekatan *performance-based budgeting*, belanja daerah diarahkan untuk menghasilkan output yang terukur dan outcome yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut (Sularso & Restianto, 2020), pendekatan anggaran berbasis kinerja membantu pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja karena setiap kegiatan harus disertai indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Evaluasi belanja daerah juga menjadi aspek penting dalam pengendalian keuangan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah belanja telah mencapai tujuan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam teori evaluasi pembangunan, belanja daerah dianggap berhasil apabila output yang dihasilkan berkualitas dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hidayati, 2022) menyatakan bahwa belanja publik yang tidak dievaluasi berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan karena tidak ada mekanisme untuk menilai keberhasilan program secara komprehensif.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, belanja daerah memiliki peran strategis sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menentukan prioritas belanja publik. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa belanja harus mendukung pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Menurut (Putra & Andini, 2021), kualitas belanja daerah sering menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah karena menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan akuntabel.

Belanja daerah juga menghadapi tantangan struktural, seperti ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, belanja pegawai yang terlalu besar, serta rendahnya kapasitas teknis di beberapa daerah. Ketergantungan fiskal menyebabkan sebagian besar belanja dibiayai melalui transfer pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang terbatas

untuk belanja pembangunan. Belanja pegawai yang besar dapat mengurangi kemampuan daerah untuk menambah belanja modal, padahal belanja modal memiliki dampak pembangunan yang lebih besar. Menurut (Wahyuni & Herlambang, 2023), daerah dengan struktur belanja tidak seimbang cenderung memiliki kualitas pembangunan rendah dan lambat merespons kebutuhan masyarakat.

belanja daerah merupakan instrumen kunci dalam manajemen keuangan daerah dan pembangunan wilayah. Belanja yang terencana, terukur, serta didukung tata kelola yang baik akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap belanja daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar memberikan manfaat optimal sesuai tujuan pembangunan daerah.

### 2.3 Value for Money

Konsep *Value for Money* (VfM) merupakan salah satu pendekatan paling penting dalam manajemen sektor publik modern karena memberikan kerangka evaluatif yang memungkinkan pemerintah memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Berbeda dengan organisasi privat yang mengukur keberhasilan berdasarkan profit, sektor publik menilai performanya berdasarkan sejauh mana anggaran yang dikelola dapat menghasilkan pelayanan dan dampak yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Value for Money menjadi prinsip yang memadukan dimensi kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah (N. Fadhila & Tanjung, 2022).

Secara historis, konsep ini lahir dari perkembangan gerakan *New Public Management* (NPM) pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang mendorong perubahan besar dalam tata kelola sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. (Hood, 1991) menjadi salah satu tokoh awal yang menekankan perlunya sektor publik mengadopsi praktik-praktik manajerial yang menekankan efisiensi dan orientasi hasil sebagaimana sektor privat. NPM menilai bahwa birokrasi tradisional terlalu lamban, boros anggaran, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Value for Money kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi permasalahan tersebut karena memungkinkan pemerintah menilai apakah proses belanja publik tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan "nilai" dan manfaat yang memadai.

Dalam perkembangan selanjutnya, Value for Money semakin dipandang sebagai pilar utama *good governance*. (Pollitt & Bouckaert, 2017) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya secara efisien dan menghasilkan hasil pembangunan yang terukur. Melalui VfM, pemerintah dapat mengevaluasi apakah layanan publik diberikan dengan biaya yang wajar dan apakah pengeluaran pemerintah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang maksimal. Dengan kata lain, VfM menghubungkan prinsip akuntabilitas fiskal dengan orientasi hasil pembangunan.

Value for Money dibangun atas tiga elemen yang saling melengkapi, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis (*economy*) menekankan kemampuan pemerintah memperoleh input seperti barang, jasa, dan sumber daya manusia dengan harga yang paling rendah namun tetap memenuhi standar kualitas tertentu. Pemerintah dianggap ekonomis apabila dapat menghindari pemborosan dan melakukan pengadaan secara hemat. Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengubah input

menjadi output secara optimal. Pemerintah yang efisien adalah yang mampu menghasilkan keluaran pelayanan publik dengan biaya yang minimal atau menghasilkan keluaran lebih besar dengan biaya yang sama. Sementara itu, efektivitas (*effectiveness*) mengukur sejauh mana hasil atau tujuan program publik tercapai. Pemerintah dikatakan efektif bila output yang dihasilkan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kebijakan (P. K. D. Lubis et al., 2023).

Ketiga elemen tersebut menjadikan Value for Money sebagai konsep multidimensional yang tidak hanya menilai pencapaian anggaran tetapi juga kualitas pelaksanaannya. Pemerintah daerah, misalnya, tidak dianggap berhasil hanya karena mampu membelanjakan anggaran secara penuh; keberhasilan lebih diukur dari apakah belanja tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah yang ekonomis tetapi tidak efektif tetap dinilai gagal, karena prinsip Value for Money menekankan keseimbangan antara penghematan, proses, dan hasil.

Penerapan Value for Money dalam konteks Indonesia semakin relevan setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberi kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan APBD secara mandiri. Dengan kewenangan ini, masyarakat menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya transparan dalam pelaporan anggaran, tetapi juga mampu mengelola anggaran tersebut dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil. (A. Sholikhah & Priyono, 2022) menjelaskan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, konsep Value for Money berfungsi sebagai alat pengawasan publik sekaligus mekanisme kontrol internal yang memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD memiliki justifikasi manfaat.

Di tingkat operasional, Value for Money diterapkan melalui pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Rasio-rasio ini memberikan gambaran objektif mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui analisis tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses belanja, potensi pemborosan, serta program-program yang belum mencapai target. Dengan demikian, Value for Money juga berperan sebagai alat diagnosis yang membantu pemerintah memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penerapan Value for Money tidak hanya bermanfaat dalam evaluasi keuangan tetapi juga dalam proses perencanaan anggaran. Dengan berorientasi pada VfM, pemerintah daerah dapat menyusun prioritas belanja yang lebih rasional dan berfokus pada kegiatan yang menghasilkan dampak jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat (W. Rahayu & Ginting, 2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi oleh seberapa efektif anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Value for Money menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah. Dengan memastikan bahwa proses penyediaan layanan publik mengedepankan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas fiskal, menekan pemborosan anggaran, dan menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan. Konsep ini tidak hanya relevan sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai filosofi pengelolaan keuangan publik yang menuntun pemerintah untuk selalu memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

## Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang berorientasi pada prinsip *Value for Money*. Dalam kerangka tersebut, rasio ekonomis berperan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memperoleh input atau sumber daya public baik berupa barang, jasa, maupun tenaga kerja dengan biaya yang serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas. Konsep ekonomi (economy) menekankan bahwa pemerintah harus melakukan pengeluaran secara hemat, efisien, dan tepat, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan setiap dana publik yang dibelanjakan memiliki justifikasi yang rasional. Menurut (N. Fadhila & Tanjung, 2022), ekonomisitas merupakan fondasi awal dalam pengelolaan keuangan publik karena keberhasilan pada tahap ini menentukan efisiensi dan efektivitas pada tahap berikutnya.

Dalam literatur manajemen publik, ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh input dengan harga terbaik melalui mekanisme pengadaan yang transparan, kompetitif, dan sesuai standar kualitas. Ekonomi bukan hanya persoalan “murah”, tetapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa proses penggunaan dana publik mengikuti asas kehati-hatian dan menghindari pemborosan. (R. Lubis et al., 2023) menjelaskan bahwa belanja pemerintah dapat dikatakan ekonomis jika realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran yang ditetapkan, menunjukkan adanya penghematan atau optimalisasi biaya. Dengan demikian, ekonomisitas merupakan ukuran awal efisiensi karena menentukan apakah sumber daya yang diperoleh sudah sesuai dengan harga pasar, spesifikasi, dan kebutuhan program. Rumus untuk menghitung Rasio Ekonomis Belanja Daerah adalah Sebagai Berikut :

Tabel 1 Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Secara teknis, rasio ekonomis dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah dinilai semakin ekonomis apabila persentase realisasi belanja terhadap anggaran semakin kecil. Namun, penilaian tidak berhenti pada angka semata. Meskipun realisasi belanja yang rendah dapat menunjukkan penghematan, tetapi jika belanja tersebut menyangkut sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar, maka realisasi yang terlalu rendah dapat mengindikasikan lemahnya kinerja perencanaan dan rendahnya kapasitas pelaksanaan program. Artinya, rasio ekonomis harus dipahami secara kontekstual, tidak sekadar berdasarkan selisih antara anggaran dan realisasi, tetapi juga berdasarkan kualitas keputusan anggaran.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ekonomisitas sangat ditentukan oleh tata kelola pengadaan yang baik. Proses pengadaan merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap inefisiensi, markup, dan konflik kepentingan. Karena itu, pemerintah harus menerapkan mekanisme pengadaan yang mengutamakan persaingan sehat, evaluasi harga yang objektif, serta seleksi penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar kualifikasi. (A. Sholikhah & Priyono, 2022) menyatakan bahwa lemahnya sistem pengadaan

sering menjadi sumber utama pemborosan anggaran daerah. Oleh karena itu, rasio ekonomis tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pengadaan, penggunaan e-procurement, serta integritas pejabat pengelola anggaran.

rasio ekonomis memiliki keterkaitan erat dengan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pemerintah yang memiliki sistem pengawasan internal yang baik akan lebih mampu mengendalikan biaya, menekan pengeluaran yang tidak perlu, dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. (T. Rahmadani et al., 2025) menegaskan bahwa penguatan sistem akuntabilitas dan kontrol internal merupakan salah satu faktor yang meningkatkan tingkat ekonomisitas belanja pemerintah. Pengawasan internal yang memadai juga memastikan bahwa setiap keputusan belanja telah melalui proses analisis kebutuhan, studi kelayakan, dan pertimbangan efisiensi biaya.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, rasio ekonomis menjadi salah satu alat evaluasi yang penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengatur prioritas belanja. Kewenangan ini harus diimbangi dengan kemampuan melakukan perencanaan anggaran yang berkualitas serta pelaksanaan yang hemat dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah yang tidak mampu menerapkan prinsip ekonomi cenderung mengalami pembengkakan anggaran, ketidaksesuaian belanja, atau realisasi yang tidak efisien. (W. Rahayu & Ginting, 2017) menyebutkan bahwa rendahnya kapasitas fiskal daerah sering kali bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh penggunaan anggaran yang tidak ekonomis.

Rasio ekonomis juga berfungsi sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran. Belanja yang jauh di bawah anggaran dapat menunjukkan penghematan, tetapi juga mungkin menandakan perencanaan yang kurang akurat. Perencanaan anggaran yang terlalu tinggi atau tidak sesuai kebutuhan dapat membuat rasio ekonomis tampak baik secara angka, tetapi tidak menggambarkan performa riil pemerintah. Oleh karena itu, rasio ekonomis harus dianalisis secara bersamaan dengan konteks kebijakan dan implementasi program, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan belanja pemerintah daerah.

Dalam perspektif manajemen publik modern, ekonomis tidak hanya dikaitkan dengan pengendalian biaya, tetapi juga dengan pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Pemerintah yang mampu meminimalkan biaya melalui pemanfaatan sistem digital, otomatisasi administrasi, dan integrasi data biasanya memiliki tingkat ekonomisitas lebih baik dibandingkan pemerintah yang masih mengandalkan proses manual dan struktur organisasi yang kaku. Selanjutnya, ekonomisitas belanja terkait pula dengan budaya kerja organisasi pemerintah. Pemerintah dengan budaya kerja yang efisien, tidak birokratis, dan berorientasi kinerja cenderung memiliki output pengelolaan belanja yang lebih hemat.

Rasio ekonomis merupakan indikator penting yang tidak hanya menilai tingkat penghematan dalam belanja pemerintah, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola anggaran, integritas proses pengadaan, efektivitas pengendalian internal, dan profesionalisme aparatur pemerintah. Penerapan rasio ekonomis secara konsisten dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pemborosan, memperbaiki manajemen anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, rasio ekonomis menjadi komponen esensial dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan.

## Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu. Dalam kerangka *Value for Money*, efisiensi berada pada posisi tengah antara ekonomis dan efektivitas, karena efisiensi menilai hubungan antara input dan output. Pemerintah dikatakan efisien apabila penggunaan anggaran untuk menghasilkan pelayanan atau program tertentu dilakukan dengan jumlah biaya minimum, atau sebaliknya, dengan biaya yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Menurut (W. Fadhila & Tanjung, 2022), efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil.

Dalam literatur manajemen publik, efisiensi digambarkan sebagai derajat keberhasilan organisasi dalam mengubah input menjadi output yang terukur. Efisiensi menekankan pentingnya proses yang ringkas, anggaran yang terkendali, serta penggunaan mekanisme operasional yang hemat biaya. Efisiensi bukan hanya persoalan angka, tetapi mencerminkan kemampuan pemerintah menjalankan program dengan cara yang paling optimal. (R. Lubis et al., 2023) menyatakan bahwa efisiensi dalam sektor publik bukan sekadar mengurangi biaya, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding atau lebih besar bagi masyarakat.

Secara teknis, rasio efisiensi dihitung melalui perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Penggunaan rumus tersebut menunjukkan apakah belanja yang dilakukan pemerintah sebanding dengan pendapatan yang berhasil dihimpun. Semakin kecil persentase belanja terhadap pendapatan, semakin efisien pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Jika belanja melebihi pendapatan, maka pemerintah dinilai tidak efisien karena pengeluaran tidak dapat ditopang oleh kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, rasio efisiensi tidak hanya menunjukkan kemampuan manajerial pemerintah dalam mengendalikan biaya, tetapi juga mencerminkan kesehatan fiskal daerah secara keseluruhan. Kita bisa menghitung Rasio Efisiensi dengan Rumus :

Tabel 2 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Dalam konteks keuangan daerah, efisiensi sangat erat kaitannya dengan kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan belanja yang tidak tepat sasaran, pemborosan, atau alokasi anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah yang efisien biasanya memiliki perencanaan anggaran yang matang, sistem pengendalian internal yang kuat, serta kemampuan menganalisis kebutuhan masyarakat secara akurat. (Rahayu, Ginting 2017) menyebutkan bahwa rendahnya efisiensi dalam belanja pemerintah sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan ketidaksesuaian antara belanja dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Pengelolaan belanja rutin dan belanja modal juga memiliki pengaruh besar terhadap tingkat efisiensi. Efisiensi dalam belanja rutin dapat terlihat dari kemampuan pemerintah menekan pemborosan pada operasional, administrasi, dan gaji pegawai. Sementara itu, efisiensi pada belanja modal tercapai ketika proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Pemerintah daerah yang mampu mengendalikan biaya proyek dan menghindari keterlambatan biasanya memiliki rasio efisiensi yang lebih baik. (Sholikhah, Priyono 2022) menegaskan bahwa perbaikan tata kelola belanja modal memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi anggaran daerah.

Selain itu, rasio efisiensi juga berkaitan erat dengan penerapan sistem pengendalian internal dan praktik akuntabilitas publik. Pemerintah yang menerapkan sistem kontrol internal dengan baik dapat mencegah penyimpangan anggaran, mendorong kehematan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. (Rahmadani et al. 2025) menjelaskan bahwa penerapan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal yang efektif dapat meningkatkan efisiensi karena memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi pemborosan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam perspektif manajemen publik modern, efisiensi juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi dan inovasi. Lembaga pemerintah yang mengadopsi digitalisasi administrasi, sistem informasi keuangan, dan teknologi pelayanan publik biasanya memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih mengandalkan proses manual dan birokrasi yang panjang. Digitalisasi mampu mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pelayanan, dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Dengan demikian, inovasi organisasi menjadi salah satu pendorong utama peningkatan efisiensi dalam pemerintahan daerah.

Efisiensi juga memiliki hubungan kuat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal. Daerah yang efisien dalam belanja cenderung dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, daerah yang tidak efisien akan menghabiskan anggaran pada hal-hal yang tidak memberikan dampak signifikan sehingga memperlambat kemajuan daerah. Efisiensi dalam belanja menjadi salah satu indikator kemampuan daerah mengelola sumber daya secara bijak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

rasio efisiensi merupakan indikator penting yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Pemerintah yang efisien tidak hanya mampu menghemat anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi rasio efisiensi yang dilakukan secara rutin dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, penyusunan anggaran yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan publik di masa mendatang. Dengan demikian, rasio efisiensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

### **Rasio efektivitas**

Rasio efektivitas merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, terutama terkait pencapaian pendapatan dan kualitas pelaksanaan program pembangunan. Efektivitas tidak hanya menggambarkan sejauh mana target tercapai, namun juga

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara tepat guna dan tepat sasaran. Menurut (Mahmudi, 2019), efektivitas merupakan ukuran yang berfokus pada hubungan antara tujuan organisasi dan hasil aktual yang dicapai. Jika hasil yang dicapai sesuai atau melampaui tujuan, maka pemerintah dikatakan efektif. Dalam konteks sektor publik, efektivitas lebih menekankan manfaat (*benefit*) dan dampak (*outcome*) daripada sekadar kuantitas output administrasi.

Konsep efektivitas dalam manajemen publik mengalami perkembangan seiring meningkatnya kompleksitas tugas pemerintah. Efektivitas tidak lagi hanya dilihat dari aspek administratif seperti penyelesaian kegiatan, tetapi juga dari perspektif manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Pollitt & Bouckaert, 2017) menegaskan bahwa efektivitas dalam organisasi publik berkaitan dengan kemampuan membawa perubahan nyata, seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, atau peningkatan pemerataan layanan publik. Oleh karena itu, efektivitas memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan ekonomis maupun efisiensi yang lebih menekankan pada hubungan input–output.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, rasio efektivitas sering digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pendapatan menjadi penting karena PAD merupakan indikator kemandirian fiskal daerah. (Halim & Kusufi, 2017) menjelaskan bahwa rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD yang telah ditentukan dalam APBD. Rasio yang tinggi menunjukkan pemerintah mampu menggali potensi fiskal daerah secara optimal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Keberhasilan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, serta memperluas basis penerimaan daerah. Untuk Mengukur Rasio Efektifitas, Bisa digunakan Rumus Sebagai Berikut :

Tabel 3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Akan tetapi, efektivitas pendapatan tidak dapat dilepaskan dari faktor perencanaan anggaran. Perencanaan yang buruk dapat menghasilkan target pendapatan yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai dan menurunkan efektivitas. Sebaliknya, target yang terlalu rendah dapat mencerminkan tidak optimalnya potensi fiskal daerah. (Mardiasmo, 2018) menekankan bahwa perencanaan pendapatan harus realistis, berdasarkan tren historis, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, serta potensi daerah. Efektivitas pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi berada dalam keseimbangan yang tepat.

Selain digunakan untuk menilai pendapatan, rasio efektivitas juga diaplikasikan pada evaluasi keberhasilan program belanja daerah. Efektivitas belanja mengukur sejauh mana program, kegiatan, dan proyek pemerintah benar-benar mencapai tujuan pembangunan.

Belanja dikatakan efektif apabila memberikan dampak yang signifikan dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan. (Kurniawan & Sari, 2021) menemukan bahwa efektivitas belanja modal daerah sangat berkaitan dengan kualitas pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana publik, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya memerhatikan pencapaian anggaran, tetapi juga perubahan yang dihasilkan dari belanja tersebut.

Selain itu, efektivitas berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah yang memiliki organisasi yang responsif, mekanisme koordinasi yang baik, serta sistem pengambilan keputusan yang berbasis data cenderung memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi. Penelitian (Pratiwi, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kemampuan analisis kebijakan, dan integritas aparatur. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya terkait pada aspek keuangan, tetapi juga kinerja birokrasi secara menyeluruh.

Pengaruh sistem pengendalian internal dan evaluasi kinerja juga sangat penting dalam efektivitas. Pemerintah yang memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang kuat dapat mengarahkan pelaksanaan program secara tepat sasaran dan melakukan koreksi dini jika terjadi penyimpangan. Menurut (Wijayanti, 2023), sistem evaluasi berbasis kinerja membantu mengukur keberhasilan output dan outcome secara sistematis, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan dan keberhasilan program, sehingga mendukung efektivitas pembangunan daerah.

Dalam konteks modernisasi pemerintahan, digitalisasi memiliki peran penting dalam mendorong efektivitas. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah, e-budgeting, e-tax, dan aplikasi pelayanan publik mampu meningkatkan kecepatan proses, memperbaiki akurasi data, serta memperluas akses layanan kepada masyarakat. Pemerintah yang mengadopsi teknologi informasi biasanya memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan pemerintah yang masih menggunakan sistem manual. Digitalisasi juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Efektivitas juga erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang direncanakan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat cenderung memberikan hasil yang lebih tepat sasaran. Peran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dapat meningkatkan relevansi program sehingga efektivitas belanja publik dapat meningkat. Menurut (Hidayat, 2020), keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah.

Selain itu, efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Dalam situasi krisis seperti pandemi, pemerintah daerah yang efektif mampu mengalihkan prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan alternatif, dan memperbaiki sistem pelayanan publik. (Julita & Rondonuwu, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah selama pandemi sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas kebijakan dan kecepatan respon pemerintah dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.

rasio efektivitas memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan pemerintah daerah mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam aspek pendapatan maupun

pelaksanaan program. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang digunakan memiliki hasil yang terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, rasio efektivitas merupakan indikator yang sangat penting dalam pengukuran kinerja keuangan daerah, penyusunan kebijakan publik, serta peningkatan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## METODOLOGI

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan analisis rasio Value for Money, meliputi rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Pendekatan ini digunakan karena penelitian mengolah data numerik laporan keuangan pemerintah daerah dan menafsirkannya secara deskriptif untuk memberikan gambaran kinerja selama tahun 2018–2024 (Pengukuran et al., 2023).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan fokus data pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 2024–2025, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Penelitian menggunakan data kuantitatif, berupa angka-angka keuangan yang terdapat dalam LRA Kota Banda Aceh, yaitu:

- Anggaran Pendapatan Daerah
- Realisasi Pendapatan Daerah
- Anggaran Belanja Daerah
- Realisasi Belanja Daerah

Data ini diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan daerah melalui rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

#### 2. Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen resmi BKAD dan publikasi pemerintah daerah tanpa harus melakukan survei langsung (Zamaludin et al., n.d.).

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan resmi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banda Aceh tahun 2018–2024.

Teknik dokumentasi digunakan karena data yang diperlukan berupa dokumen tertulis yang telah diterbitkan dan telah diolah oleh instansi pemerintah (Pengukuran et al., 2023).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis rasio Value for Money**, yang terdiri atas:

#### **Rasio Ekonomis**

Rasio ekonomis digunakan untuk mengukur tingkat penghematan pemerintah dalam merealisasikan belanja daerah. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja.

#### **Kriteria:**

- < 100% → Ekonomis
- = 100% → Sesuai anggaran
- 100% → Tidak ekonomis (Pengukuran et al., 2023)

#### **Rasio Efisiensi**

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah dalam menggunakan pendapatan untuk membiayai belanja secara optimal. Perhitungan menggunakan perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan.

#### **Kriteria umum:**

- < 60% → Sangat efisien
- 60–80% → Efisien
- 80–90% → Cukup efisien
- 90% → Tidak efisien (Pembangunan & Budi, 2024)

#### **Rasio Efektivitas**

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan

#### **Kriteria:**

- 100% → Sangat efektif
- 90–100% → Efektif
- 80–90% → Cukup efektif

< 80% → Tidak efektif (Kasus et al., 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan pendekatan Value for Money, yaitu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang menilai apakah pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan ini digunakan secara luas dalam penelitian pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Ariska (2023) dalam penelitiannya tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang menggunakan rasio Value for Money sebagai alat evaluatif kinerja organisasi publik (Pengukuran et al., 2023). Data penelitian yang dianalisis mencakup periode 2018–2024, yang terdiri atas:

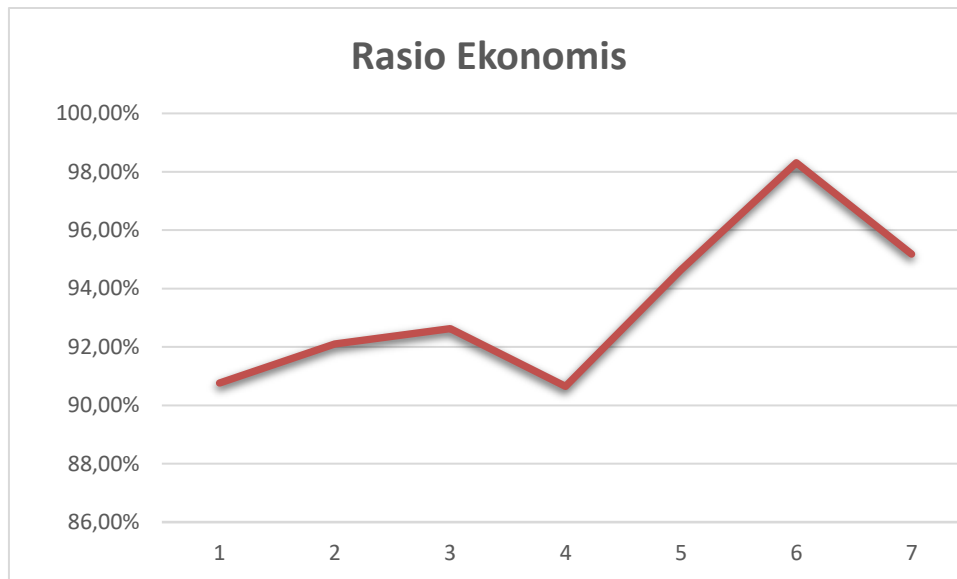
- Anggaran dan realisasi pendapatan daerah
- Anggaran dan realisasi belanja daerah
- Rasio ekonomis
- Rasio efisiensi
- Rasio efektivitas

Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kota Banda Aceh, yang menjadi dokumen resmi untuk mengukur kinerja fiskal setiap pemerintah daerah. LRA merupakan salah satu instrumen pelaporan keuangan yang digunakan sebagai indikator utama evaluasi sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Setiawan dkk. (2021), yang menegaskan bahwa LRA mewakili kondisi riil pelaksanaan keuangan suatu daerah dan menjadi dasar dalam analisis Value for Money (Zamaludin et al., n.d.). Dengan cakupan data selama tujuh tahun, penelitian ini tidak hanya memotret satu titik waktu, tetapi memberikan gambaran dinamika kinerja keuangan Banda Aceh melalui kecenderungan rasio dari tahun ke tahun, termasuk perubahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19—faktor penting yang mempengaruhi fiskal banyak daerah di Indonesia sebagaimana ditemukan juga dalam penelitian Alfredo dkk (Kasus et al., 2025).

### Analisis Rasio Ekonomis

Tabel 4 Rasio Ekonomis Kota Banda Aceh

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	1.152.989.473.433,00	1.046.500.852.724,67	90,76%	Ekonomis
2019	1.182.117.004.262,00	1.088.763.331.629,61	92,10%	Ekonomis
2020	1.237.652.961.908,00	1.146.484.210.994,00	92,63%	Ekonomis
2021	1.332.172.790.336,00	1.207.566.184.958,00	90,65%	Ekonomis
2022	1.410.626.047.131,00	1.334.880.241.909,79	94,63%	Ekonomis
2023	1.305.573.490.597,00	1.283.554.951.050,97	98,31%	Ekonomis
2024	1.410.323.642.467,00	1.342.398.868.864,30	95,18%	Ekonomis



Gambar 1 Grafik Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghemat belanja. Belanja dikatakan ekonomis apabila realisasinya lebih rendah dari anggaran. Menurut Ariska (2023), rasio ekonomis membantu melihat apakah pemerintah mampu menahan biaya operasional, sehingga menghindari pemborosan anggaran (Pengukuran et al., 2023).

### Perkembangan Rasio Ekonomis 2018–2024

Hasil perhitungan menunjukkan:

- 2018–2024: seluruhnya berada di bawah 100% → ekonomis
- Nilai tertinggi: 2023 = 98,31%
- Nilai terendah: 2021 = 90,65%

### Pembahasan Rasio Ekonomis (Naratif Panjang)

Kondisi ekonomis yang konsisten menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mampu menjaga realisasi belanja agar tidak melampaui anggaran. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penganggaran telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dan pelaksanaan belanja dikelola sesuai kemampuan fiskal daerah.

Pada tahun 2018–2020, rasio ekonomis menunjukkan kecenderungan stabil di angka 90–93%. Hal ini menggambarkan bahwa pada masa sebelum pandemi, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang baik untuk mengendalikan belanja. Tahun 2020, meskipun merupakan tahun awal pandemi COVID-19, pemerintah tampak mampu melakukan efisiensi atas berbagai program yang terdampak pembatasan aktivitas sehingga banyak kegiatan yang tertunda atau dialihkan.

Tahun 2021 menjadi tahun dengan rasio paling rendah (90,65%). Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belanja daerah yang tidak terealisasi akibat pembatasan mobilitas, refocusing anggaran, serta adanya pengalihan dana untuk

penanganan COVID-19. Beberapa daerah lain di Indonesia, sebagaimana dijelaskan Alfredo dkk. (2025), juga mengalami fenomena yang sama: adanya efisiensi “paksa” karena program ditunda (Kasus et al., 2025).

Sementara itu, tahun 2022–2024 kembali menunjukkan peningkatan persentase realisasi terhadap anggaran, tetapi tetap berada dalam kategori ekonomis. Tahun 2023 mencapai nilai tertinggi (98,31%), menandakan belanja sangat mendekati anggaran namun masih hemat. Nilai ini dapat diinterpretasikan sebagai tahun di mana pemerintah telah kembali menjalankan banyak program yang tertunda selama pandemi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nasution (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara, yang menemukan bahwa rasio ekonomis sering kali stabil karena pemerintah cenderung membuat anggaran belanja lebih tinggi dari realisasi sebagai bentuk bagi-bagi prioritas yang berhati-hati (Pembangunan & Budi, 2024).

### Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 5 Rasio Efisiensi Kota Banda Aceh

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	1.046.500.852.724,67	1.135.914.599.521,72	92,13%	Kurang Efisien
2019	1.088.763.331.629,61	1.215.834.088.158,63	89,54%	Cukup Efisien
2020	1.146.484.210.994,00	1.258.996.719.879,62	91,06%	Kurang Efisien
2021	1.207.566.184.958,00	1.209.597.173.418,43	99,83%	Kurang Efisien
2022	1.334.880.241.909,79	1.355.586.767.032,27	98,47%	Kurang Efisien
2023	1.283.554.951.050,97	1.272.623.511.811,12	100,85%	Tidak Efisien
2024	1.342.398.868.864,30	1.348.293.466.049,35	99,57%	Kurang Efisien

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat apakah pendapatan daerah mampu membiayai belanja. Penelitian Nasution (2024) menyatakan bahwa efisiensi merupakan tantangan utama banyak daerah karena belanja operasional cenderung tinggi dan sering tidak sebanding dengan pendapatan (Pembangunan & Budi, 2024).

### Perkembangan Rasio Efisiensi 2018–2024

Hasil menunjukkan:

- Hanya tahun 2019 yang efisien (89,54%)
- Tahun 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 → kurang efisien
- Tahun 2023 → tidak efisien (100,85%)

### Pembahasan Rasio Efisiensi (Naratif Panjang)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh menghadapi tantangan signifikan dalam hal efisiensi. Meskipun pemerintah telah ekonomis dalam belanja, ternyata belanja tersebut masih terlalu besar dibandingkan pendapatan yang masuk.

Fenomena ini umum terjadi di pemerintah daerah sebagaimana ditemukan Setiawan dkk. (2021), bahwa struktur pendapatan daerah sering kali tidak mampu mengejar kebutuhan belanja karena mayoritas daerah masih bergantung pada transfer pusat (Zamaludin et al., n.d.).

#### Tahun 2019: Tahun terbaik dalam efisiensi

Dengan nilai 89,54%, Banda Aceh menunjukkan kinerja paling efisien. Ini mungkin dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan sebelum pandemi dan keterkendalian belanja.

#### Tahun 2020 dan 2021: Efisiensi memburuk

Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan pajak daerah, sedangkan beberapa biaya—khususnya belanja pegawai—tidak bisa dikurangi secara proporsional. Kondisi serupa ditemukan Alfredo dkk. (2025) saat menganalisis Manggarai yang mengalami penurunan efisiensi pada masa pandemi (PDF di atas).

#### Tahun 2023: Titik terburuk (100,85%)

Rasio yang melebihi 100% menunjukkan belanja lebih besar daripada pendapatan. Penyebabnya dapat meliputi:

- Banyak kegiatan pembangunan yang sempat tertunda di masa pandemi kemudian dilaksanakan pada 2023
- Pendapatan daerah yang melambat
- Belanja operasional meningkat

Secara keseluruhan, Banda Aceh harus memperbaiki pengendalian belanja serta memaksimalkan sumber pendapatan alternatif sehingga tekanan efisiensi dapat dikurangi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nasution (2024), yang menunjukkan bahwa rendahnya efisiensi adalah masalah berulang di berbagai pemerintah daerah Sumatera (Pembangunan & Budi, 2024)

### Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 6 Efektivitas Pendapatan Pemerintah daerah Kota Banda Aceh

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	1.217.868.908.236,00	1.135.914.599.521,72	93,27%	Efektif
2019	1,301,052,703,323.00	1,215,834,088,158.63	93,45%	Efektif
2020	1.303.472.173.205,00	1.258.996.719.879,62	96,59%	Efektif
2021	1.324.514.182.725,00	1.209.597.173.418,43	91,32%	Efektif
2022	1.398.086.779.179,00	1.355.586.767.032,27	96,96%	Efektif

2023	1.270.508.026.829,00	1.272.623.511.811,12	100,17%	Sangat Efektif
2024	1.398.493.429.906,00	1.348.293.466.049,35	96,41%	Efektif

Efektivitas mengukur sejauh mana pemerintah mampu mencapai target pendapatan. Menurut Ariska (2023), rasio efektivitas mencerminkan kualitas perencanaan pendapatan serta kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskal (Pengukuran et al., 2023).  
**Perkembangan Efektivitas 2018–2024**

- Seluruh tahun mencapai > 90% → efektif
- Tahun 2023 → paling efektif (100,17%)
- Tahun 2021 → paling rendah tetapi masih efektif (91,32%)

**Pembahasan Efektivitas (Naratif Panjang)**

Kinerja pendapatan Banda Aceh dapat dikatakan sangat baik. Selama tujuh tahun berturut-turut, pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan di atas 90% dari target.

**Efektivitas sebelum pandemi (2018–2019)**

Pendapatan daerah menunjukkan stabilitas yang baik. Target dirancang realistis dan berhasil dicapai secara konsisten.

**Efektivitas saat pandemi (2020–2021)**

Meskipun terdapat gangguan ekonomi, Banda Aceh tetap mampu mempertahankan rasio efektivitas di atas 90%. Ini menunjukkan:

- Struktur PAD relatif stabil
- Ketergantungan pada transfer pusat membantu menjaga pendapatan

Temuan ini sejalan dengan analisis Setiawan dkk. (2021), bahwa daerah yang memiliki administrasi pendapatan yang kuat dan mekanisme pemungutan pajak yang baik tetap dapat efektif meski kondisi ekonomi melemah (Zamaludin et al., n.d.).

**Efektivitas pasca-pandemi (2022–2024)**

Pendapatan kembali pulih, dan tahun 2023 bahkan mencapai rasio sangat efektif (melebihi 100%). Hal ini menunjukkan bahwa:

- Pemerintah berhasil memperluas basis pendapatan
- Target pendapatan disusun sesuai realita
- Ada peningkatan aktivitas ekonomi lokal

**Interpretasi Value of Money Secara Keseluruhan**

Menggabungkan hasil ketiga rasio:

Aspek	Penilaian Umum	Makna
Ekonomis	Sangat baik	Pemerintah hemat dalam merealisasikan belanja
Efisiensi	Lemah	Belanja terlalu besar dibanding pendapatan
Efektivitas	Sangat baik	Pendapatan stabil dan target tercapai

Kinerja ekonomis dan efektivitas Banda Aceh menunjukkan bahwa pemerintah:

- mampu merencanakan anggaran secara realistis,
- mampu mencapai target pendapatan,
- mampu mengendalikan realisasi belanja agar tidak melebihi anggaran.

Namun, masalah utama terletak pada efisiensi, yaitu hubungan antara belanja dan pendapatan.

Efisiensi yang rendah meski ekonomis menunjukkan bahwa:

- Belanja daerah lebih besar daripada kemampuan pendapatan daerah
- Pendapatan yang dicapai belum cukup menutup belanja
- Struktur belanja mungkin terlalu berat pada belanja rutin

Temuan mengenai rendahnya efisiensi Pemerintah Kota Banda Aceh ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi pola serupa pada pemerintah daerah lain di Indonesia. Pertama, penelitian Nasution (2024) pada pemerintah daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami tingkat efisiensi yang rendah, di mana realisasi belanja cenderung lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah (Pembangunan & Budi, 2024).

Nasution menegaskan bahwa struktur belanja pemerintah daerah yang cenderung tinggi dan sulit ditekan—terutama pada pos belanja operasional dan belanja pegawai—menjadi penyebab utama inefisiensi. Pola ini sangat mirip dengan yang terjadi di Banda Aceh, di mana dominasi belanja rutin juga menyebabkan belanja daerah menjadi lebih besar dibandingkan pendapatan, terutama pada tahun 2021–2023. Selanjutnya, penelitian Setiawan (2021) memperkuat gambaran tersebut dengan menyatakan bahwa beban belanja rutin seperti gaji, tunjangan, dan biaya operasional lainnya merupakan faktor utama yang menggerus kemampuan efisiensi pemerintah daerah (Zamaludin et al., n.d.).

Setiawan menekankan bahwa belanja rutin bersifat wajib dan tidak dapat dikurangi secara fleksibel, sehingga ketika pendapatan menurun atau tidak memenuhi target, daerah otomatis menjadi tidak efisien. Hal ini sangat relevan dengan temuan pada Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama dalam periode setelah pandemi COVID-19, ketika pendapatan tidak tumbuh secara signifikan tetapi belanja rutin tetap harus dipenuhi.

penelitian Alfredo dkk. (2025) menyoroti bahwa efisiensi pemerintah daerah sangat sensitif terhadap realisasi program pembangunan, terutama belanja modal dan belanja barang/jasa yang berkaitan dengan proyek pengembangan infrastruktur serta pelayanan publik (Kasus et al., 2025). Ketika suatu daerah melaksanakan banyak kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran—seperti yang terjadi di Banda Aceh pada 2023—realisasi belanja dapat melonjak cukup tinggi. Jika lonjakan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka daerah akan tampak tidak efisien secara finansial. Temuan ini

menjelaskan fenomena di Banda Aceh tahun 2023, yaitu rasio efisiensi yang mencapai 100,85%, yang menandakan pelaksanaan belanja publik dalam intensitas tinggi tanpa diikuti peningkatan pendapatan yang sepadan.

Berdasarkan seluruh hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perspektif Value for Money menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari sisi ekonomis, pemerintah telah mampu menjaga komitmen terhadap penghematan anggaran, yang terlihat dari seluruh rasio ekonomis yang berada di bawah 100% selama periode 2018–2024. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang baik serta disiplin dalam pengendalian belanja.

Pada sisi efektivitas, Pemerintah Kota Banda Aceh juga menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Selama tujuh tahun berturut-turut, realisasi pendapatan selalu berada pada tingkat efektif, bahkan mencapai tingkat sangat efektif pada 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pemerintah pusat, dikelola secara optimal dengan pencapaian target yang konsisten.

Namun, capaian positif tersebut belum diikuti oleh peningkatan pada aspek efisiensi. Tingkat efisiensi yang rendah dan cenderung menurun, terutama pada periode pasca-pandemi, menunjukkan bahwa belanja daerah masih lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan. Ketidakefisienan yang berulang mengindikasikan adanya struktur belanja yang tidak seimbang, dominasi belanja rutin, dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Kondisi ini juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Nasution (2024), Setiawan (2021), dan Alfredo dkk. (2025), yang menekankan bahwa inefisiensi adalah masalah umum pada banyak pemerintah daerah, terutama ketika pendapatan tidak berkembang secara proporsional dengan belanja.

Secara keseluruhan, hasil analisis Value for Money pada Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang telah berjalan baik dan area yang masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah telah berhasil mempertahankan efektivitas dan ekonomis yang stabil, tetapi peningkatan efisiensi tetap menjadi prioritas penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dan lebih sehat di masa mendatang. Evaluasi pada bab ini menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan dan saran pada Bab 5, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh ke depannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2018–2024 menggunakan pendekatan Value for Money, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menjelaskan kondisi pengelolaan fiskal daerah secara komprehensif.

#### **1. Kinerja Ekonomis Pemerintah Kota Banda Aceh Tergolong Baik dan Stabil**

Selama tujuh tahun penelitian, rasio ekonomis selalu berada di bawah 100%, yang berarti realisasi belanja tetap lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan prinsip penghematan (economy) dalam proses pelaksanaan anggaran. Kondisi ini mencerminkan perencanaan belanja yang realistis, pengendalian belanja yang ketat, serta kecenderungan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, ketika banyak daerah mengalami ketidakstabilan belanja, Banda Aceh tetap dapat mempertahankan

penghematan anggaran. Dengan demikian, dari sisi ekonomis, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap efektivitas penggunaan sumber daya.

## **2. Efektivitas Pendapatan Menunjukkan Kinerja yang Sangat Baik**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh konsisten mencapai target pendapatan daerah setiap tahun. Seluruh rasio efektivitas berada pada kategori efektif (>90%), bahkan pada tahun 2023 mencapai tingkat sangat efektif (100,17%). Stabilitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. Efektivitas yang terus terjaga juga menunjukkan bahwa perencanaan target pendapatan telah dilakukan secara realistis dan dilandasi analisis kondisi ekonomi daerah. Ketahanan pendapatan selama masa pandemi menegaskan bahwa pemerintah memiliki sistem pemungutan, administrasi fiskal, dan mekanisme penetapan target yang solid.

## **3. Efisiensi Menjadi Permasalahan Utama dalam Kinerja Keuangan Daerah**

Berbeda dengan dua aspek lainnya, efisiensi menjadi indikator yang paling lemah dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh. Kecuali pada tahun 2019 yang masuk kategori efisien, seluruh tahun lain menunjukkan kondisi kurang efisien hingga tidak efisien. Ketidakefisienan ini terjadi karena realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada Banda Aceh, tetapi juga umum terjadi pada banyak daerah lain sebagaimana diperkuat oleh berbagai penelitian sebelumnya. Faktor penyebab ketidakefisienan ini antara lain dominasi belanja rutin, peningkatan belanja pasca-pandemi, dan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer. Dengan kata lain, meskipun pemerintah hemat dan mampu mencapai target pendapatan, struktur belanja yang berat tidak mampu diseimbangkan dengan kemampuan pendapatan daerah.

## **4. Gambaran Umum Value for Money**

Ketika ketiga indikator Value for Money disatukan, terlihat adanya ketidakseimbangan antara ekonomi–efektivitas yang baik dengan efisiensi yang rendah. Pemerintah mampu mencapai target pendapatan dan menahan belanja agar tetap hemat, tetapi tidak berhasil mengoptimalkan hubungan antara belanja dan pendapatan. Kondisi ini menandakan bahwa Banda Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang seimbang, berkelanjutan, dan efisien. Temuan pada penelitian ini mempertegas perlunya reformasi fiskal di tingkat daerah agar belanja dapat diarahkan lebih produktif dan tidak menimbulkan beban struktural bagi APBD di tahun-tahun mendatang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran konstruktif yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

### **1. Memperkuat Pengendalian Belanja untuk Meningkatkan Efisiensi**

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah, terutama belanja rutin yang menyumbang porsi terbesar dalam APBD. Penguatan pengendalian belanja dapat dilakukan melalui:

- analisis kebutuhan anggaran berbasis kinerja,
- optimalisasi penggunaan belanja pegawai,
- peninjauan kembali kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik,
- peningkatan efisiensi belanja operasional harian.

Dengan memperbaiki struktur belanja, rasio efisiensi diharapkan dapat meningkat menuju kondisi ideal.

## 2. Mendorong Belanja Produktif dan Investasi Pembangunan

Untuk meningkatkan kualitas efisiensi, pemerintah perlu mengalihkan sebagian belanja dari belanja rutin menuju belanja modal dan belanja pembangunan yang memberikan multiplier effect bagi pendapatan daerah. Belanja produktif dapat memperkuat basis ekonomi lokal, memperbesar PAD, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan prinsip efektif dan hemat.

## 3. Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Menekan Beban Fiskal

Meskipun kemampuan pendapatan sudah efektif, optimalisasi PAD masih dapat terus ditingkatkan melalui:

- digitalisasi sistem pemungutan,
- perluasan objek pajak dan retribusi,
- peningkatan kualitas layanan publik berbasis kinerja,
- kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan usaha daerah.

Optimalisasi pendapatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan akan membantu menyeimbangkan hubungan antara belanja dan pendapatan, sehingga efisiensi dapat tercapai.

## 4. Memperkuat Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Value for Money

Pemerintah perlu menjadikan prinsip Value for Money sebagai pijakan utama dalam penyusunan APBD, tidak hanya sebagai alat evaluasi akhir tahun. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah merancang program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhitungkan efisiensi dan efektivitas sejak tahap perencanaan. Penggunaan indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators) berbasis VFM dapat memperjelas prioritas pembangunan daerah.

## 5. Melakukan Evaluasi Rutin terhadap Kinerja dan Struktur Anggaran

Evaluasi anggaran yang bersifat periodik dan terstruktur sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber ketidakefisienan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Evaluasi semacam ini tidak hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, tetapi juga secara triwulanan agar penyesuaian dapat dilakukan segera ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.50>
- Fadhila, W., & Tanjung, H. (2022). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik*. Tidak disebutkan.
- Halim, A. (2021). *Pengantar Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Hidayat, S. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 101–115.
- Hidayati, N. (2022). Evaluasi Belanja Publik dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 33–48.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*.
- Julita, M., & Rondonuwu, D. (2021). Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pembangunan*, 12(3), 87–99.
- Kasus, S., Kabupaten, P., Tahun, M., Tandirau, F., Tandiamal, F. G., Edo, T. J., Meerbothe, V. V., P, Y. S. R., & Asri, M. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money*. 397–401.
- Kurniawan, B., & Sari, W. (2021). Analisis Efektivitas Belanja Modal terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 55–68.
- Lubis, P. K. D., Handayani, L., & Hidayah, N. F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i1.449>
- Lubis, R., Siregar, H., & Nasution, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Laporan Realisasi Anggaran. *Tidak Disebutkan*.
- Luther, C. C. (2016). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Pada Kentucky Fried Chicken Di Manado ) the Influence of Information Management Accounting Effect on the Company Performance ( Study in Kentucky Fried Chicken Manado ). *Jurnal EMBA*, 4(1), 504–513.
- Mahmudi. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (4th ed.). UPP STIMYKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). *ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA* Nina. 08(03), 1–10.
- Pengukuran, A., Keuangan, K., Daerah, P., Menggunakan, D., Pendapatan, B., Dan, K., & Daerah, A. (2023). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG)*.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Pratiwi, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Ditinjau dari Kapasitas Kelembagaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–160.
- Putra, R., & Andini, L. (2021). Belanja Daerah dan Keberhasilan Otonomi Daerah: Analisis Kapasitas Fiskal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 90–105.
- Rahayu, S., & Ginting, E. S. M. (2017). PENGARUH SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 2(2), 1–17.
- Rahayu, W., & Ginting, A. (2017). Kapasitas Fiskal Daerah dan Tantangan Kemandirian

- Keuangan. *Tidak Disebutkan.*
- Rahmadani, S., Zulfikar, & Nurhayati, T. (2025). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Teori Keagenan. *Tidak Disebutkan.*
- Rahmadani, T., Nurmadi, R., & Arief, M. (2025). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018-2023. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(2), 411–423.  
<https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i2.6305>
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Sholikhah, A., & Priyono, H. (2022). Otonomi Daerah dan Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tidak Disebutkan.*
- Stiglitz, J. E. (2016). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton & Company.
- Sucipto. (2003). Pengukuran Kinerja Keuangan dalam Organisasi Publik. *Tidak Disebutkan.*
- Sularso, A., & Restianto, Y. (2020). Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(3), 201–215.
- Suparmoko, M. (2020). Peran Belanja Modal dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 14(2), 112–125.
- Wahyuni, S., & Herlambang, R. (2023). Struktur Belanja Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 17(1), 58–72.
- Wijayanti, N. (2023). Pengaruh Evaluasi Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Publik Indonesia*, 8(1), 22–37.
- Zamaludin, A., Annurul, D. S., Pengukuran, A., & Menggunakan, K. (n.d.). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA SATUAN KERJA BALAI PENELITIAN TAMANAN HIAS KAB. CIANJUR PERFORMANCE*. 132–146.